

Transformasi Digital dan Kontribusi Bangsa Menuju Indonesia Bebas Korupsi

Diva Syawalanny Putri Joniartho

Mahasiswa D3 Sekretari Universitas Tarakanita



Transformasi Digital sebagai Momentum Pembangunan Nasional

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis dalam pembangunan Indonesia. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing ekonomi, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai sarana modernisasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, transformasi tersebut tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, melainkan juga pada kualitas institusi dan integritas para penyelenggara negara. Tanpa fondasi tersebut, digitalisasi hanya akan menjadi perubahan administratif yang belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar dalam pemerintahan.

Korupsi sebagai Tantangan Transformasi Digital



Illustrated by Pinterest

Salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi Indonesia adalah korupsi. Korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum oleh individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata Kelola pemerintahan.

Penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya integritas sebagian aparatur negara menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi Indonesia adalah korupsi. Korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum oleh individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan. Penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya integritas sebagian aparatur negara menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa kemajuan regulasi dan perkembangan teknologi belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan sistem baru, tetapi juga harus diiringi dengan perubahan budaya birokrasi serta penguatan nilai integritas. Teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif apabila masih dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Digitalisasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Transparansi

Dalam laporan *Open Government in Indonesia*, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjelaskan bahwa pemerintahan yang terbuka merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi elemen utama dalam membangun kepercayaan publik. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan.

Sejalan dengan rekomendasi tersebut, pemerintah Indonesia terus mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui digitalisasi layanan publik, integrasi data antarlembaga, serta pengadaan barang dan jasa secara elektronik, proses administrasi menjadi lebih efisien sekaligus lebih mudah diawasi.

Implementasi SPBE telah diwujudkan melalui berbagai layanan digital, seperti **Online Single Submission (OSS)** untuk perizinan berusaha, **Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)** dan **e-Katalog LKPP** dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta **Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital** yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform. Sistem-sistem tersebut menciptakan rekam jejak digital yang dapat ditelusuri sehingga mengurangi peluang manipulasi dokumen maupun penyalahgunaan kewenangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menempatkan digitalisasi sebagai salah satu strategi pencegahan korupsi karena sistem elektronik mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun demikian, digitalisasi bukanlah solusi tunggal dalam pemberantasan korupsi. Keberhasilan transformasi digital tetap bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan sistem secara jujur dan bertanggung jawab. Reformasi tata kelola harus berjalan beriringan dengan pembentukan budaya integritas agar teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kontribusi Bangsa dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi



Illustrated by Pinterest

Transformasi digital membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki posisi strategis karena tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital. Mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya antikorupsi.

Kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai aksi nyata, seperti menyelenggarakan seminar literasi digital, membuat kampanye antikorupsi melalui media sosial, mengembangkan aplikasi pelaporan pelayanan publik, hingga memanfaatkan keterbukaan data pemerintah untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah maupun desa. Selain itu, membiasakan sikap jujur dalam lingkungan akademik, seperti menghindari plagiarisme dan menolak praktik kecurangan, merupakan bentuk sederhana tetapi penting dalam menanamkan nilai antikorupsi sejak dini.

Peran tersebut tentu harus didukung oleh kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah berkewajiban memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan implementasi SPBE berjalan secara optimal. Sektor swasta perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang berintegritas, sedangkan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab membentuk generasi yang tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga memiliki karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika. Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar transformasi digital mampu menghasilkan kemajuan yang berkelanjutan.

Penutup

Transformasi digital pada hakikatnya bukan sekadar proses mengadopsi teknologi baru, melainkan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Digitalisasi harus dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat pengawasan, memperluas akses informasi publik, serta mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila kemajuan teknologi berjalan seiring dengan penguatan integritas manusia dan kualitas institusi negara. Dengan menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai antikorupsi sebagai fondasi utama, transformasi digital tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melahirkan pemerintahan yang bersih, masyarakat yang percaya, serta bangsa yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan. /SF

Daftar Pustaka

Raihan Muhammad. (2025). Pemberantasan Korupsi Era Digital

[Pemberantasan Korupsi Era Digital](#)

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). *Open Government in Indonesia*. OECD Publishing.

<https://doi.org/10.1787/9789264265905-en>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2024*. OECD Publishing.

[OECD Economic Surveys: Indonesia 2024 | OECD](#)

Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*. Transparency International.

[Corruption Perceptions Index 2024 - Transparency.org](#)

Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. BPS.

[Statistik Indonesia 2025 - Badan Pusat Statistik Indonesia](#)